

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Dari Halaman 1

Laporan pertama yang diterima KPK berasal dari Gerakan Aktivistis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada Rabu, 31 Juli 2024. Mereka mendesak KPK memeriksa Menteri Agama Yaqut Cholil dan Wakilnya Saiful Rahmat Dasuki.

Kemudian, laporan yang kedua ialah dari Front Pemuda Anti-Korupsi pada Kamis, 1 Agustus 2024. Mereka menyebut ada kejanggalan dalam pengalihan kuota haji secara sepihak oleh Kementan RI.

Laporan selanjutnya datang dari mahasiswa STMIK Jayakarta. Mereka membuat laporan pengaduan ke KPK pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Selanjutnya, laporan keempat dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat) pada

Senin, 5 Agustus 2024.

Laporan terakhir dilayangkan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Indonesia (JPI) kepada KPK pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Salah satu laporan dari AMALAN Rakyat menyebut kalau Yaqut telah menyalahgunakan wewenang dan bertindak sewenang-wenang dengan mengalihkan kuota haji reguler ke haji khusus sebesar 50 persen secara sepihak.

Tindakan Yaqut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang menyatakan kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen dari total kuota haji Indonesia.

"KPK harus melakukan pemeriksaan secara mendalam dan meluas terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kuota haji karena telah merugikan masyarakat yang antri puluhan

tahun," kata Koordinator AMALAN Rakyat, Raffi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Disebutkan dalam Rapat Panja Haji terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 bersama Menag Yaqut pada 27 November 2023, disepakati bahwa kuota haji Indonesia tahun 2024 berjumlah 241.000 jemaah. Rinciannya, 221.720 untuk jemaah haji reguler dan 19.280 untuk jemaah haji khusus.

Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada 20 Mei 2024, terungkap bahwa Kementerian Agama secara sepihak menetapkan kuota haji reguler menjadi 213.320 dan kuota haji khusus menjadi 27.680.

Artinya, Kementerian Agama telah mengalihkan 8.400 kuota jemaah haji reguler untuk jemaah haji khusus tanpa persetujuan.(ic/js)

Eks Hakim MK Jadi

Dari Halaman 1

ode 2003-2008 Maruarar Siahaan sebagai ahli dalam-sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (19/6).

"Kita pagi ini menghadirkan satu ahli yaitu Dr. Maruarar Siahaan, Hakim Indonesia dan Hakim MK," ujar tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, Kamis (19/6).

Maruarar nantinya akan diminta untuk menjelaskan tafsir Undang-undang serta putusan perkara nomor 18 dan 28 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah lima tahun lalu.

Perkara nomor 18 dan 28 dimaksud adalah perkara yang menjerat mantan kader PDIP Saeful Bahri, mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina.

"Di mana tidak ada bukti Hasto Kristiyanto terlibat kasus suap Wahyu Setiawan tetapi terjadi daur ulang sehingga ada penyusutan atau penyelundupan hukum yang membuat Hasto Kristiyanto menjadi terdakwa tanpa bukti yang kuat melainkan asumsi belaka," kata Ronny.

Maruarar Siahaan merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1967. Dia juga pernah mengikuti Pendidikan Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum pada International And Comparative Law Center, Southwestern Legal Foundation, Dallas, 1976.

Pria kelahiran Sumatera Utara ini juga mengikuti berbagai kursus dan pelatihan hukum lain seperti Up Grading hakim negara bagian Amerika Serikat pada National College for State Judiciary University of Nevada, Reno (1976), Visiting Scholar School of Law, University of California, Berkeley (1990-1991) dan Judicial Orientation, New South Wales, Judicial Commission, Wollorogong Australia (1997).

Dalam kariernya di dunia peradilan, Maruarar sempat menempati jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan Tinggi.

Hasto disebut terlibat dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Hasto diduga mengeluarkan sebagian uang suap sejumlah Rp400 juta.

Jaksa juga meyakini Hasto telah merintangi penyidikan perkara Harun Masiku. Hasto disebut memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti termasuk handphone dan meminta Harun Masiku melarikan diri (hingga saat ini belum diketahui keberadaannya).

Sejumlah saksi sudah diperiksa dalam persidangan ini. Di antaranya Penyidik KPK Rossa Purbo Bektii, Penyidik KPK Arif Budi Raharjo, serta saksi dari internal PDIP dan KPU RI..(cnni/js)

Putin Siap Turun Tangan

Dari Halaman 1

ampaikan saat Putin berbincang dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

"Vladimir Putin mengonfirmasi kesiapan Rusia memberi bantuan mediasi untuk mendorong dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, menginformasikan tentang kontak dengan sejumlah pemimpin asing dalam hal ini," demikian pernyataan resmi Kremlin, dikutip kantor berita TASS.

Rusia memang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan Iran. Salah satu pihak bisa menjadi negosiator adalah punya hubungan

dengan pihak-pihak terkait atau yang berkonflik. Namun, Negeri Beruang Merah juga sedang berperang dengan Ukraina.

Saat berbincang dengan MBZ, Putin juga menyampaikan kekhawatiran dia karena konflik yang terus meningkat antara Iran-Israel. Mereka sepakat perang itu berdampak buruk ke Timur Tengah.

"Kedua belah pihak menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik Iran-Israel yang terus berlanjut dan penuh dengan konsekuensi paling negatif bagi seluruh kawasan," lanjut Kremlin.

Menanggapi niat Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru menolak tawaran

tersebut.

Menurut Trump, Putin sebaiknya mencekikan dan memperhatikan perang antara negaranya sendiri dengan Ukraina yang masih berlangsung sejak tiga tahun terakhir.

Ia menyindir Putin sebaiknya mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina terlebih dahulu sebelum memikirkan peperangan di negara lain.

"Dia (Putin) sebenarnya menawarkan bantuan untuk mediasi. Saya lalu bilang 'tolong bantu saya, mediasi (perang) Anda sendiri dulu. Mari kita mediasi Rusia dulu, ok?'," ucap Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Rabu (18/6) saat ditanya soal percakapannya dengan Putin soal Iran-Israel.(cnni/js)

Prabowo Bubarkan Satgas Pungli era Jokowi

Dari Halaman 1

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. "Keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sudah tidak efektif sehingga perlu membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,"

bunyi poin tersebut.

Dikeluarkannya Perpres 49/2025 itu pun mencabut Perpres 87/2016 yang menjadi dasar hukum pembentukan Satgas Saber Pungli.

"Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi Pasal 1.

Satgas Saber Pungli ini dibentuk oleh Jokowi pada Oktober 2016 lalu.

Saat itu, Jokowi optimistis Satgas Saber Pungli dapat memberantas praktik pungutan liar di seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah.

Satgas Saber Pungli ini di bawah komando Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam.(cnni/js)

Iran Hancurkan Drone Hermes 900

Dari Halaman 1

keadaan hancur usai ditembak jatuh oleh pasukan Iran.

"Selama kegiatan operasional, rudal permukaan-ke-udara diluncurkan ke sebuah kendaraan nirawak Angkatan Udara," demikian pernyataan Pasukan Pertahanan Israel (IDF), mengonfirmasi tembak jatuh tersebut, seperti dikutip The Times of Israel.

"Mencapai superioritas udara melibatkan tindakan inisiatif dan ofensif, yang disertai dengan biaya yang telah diperhitungkan. Kami terus

berjuang untuk dapat mempertahankan superioritas udara," lanjut IDF.

Dalam pernyataan usai meluncurkan gelombang serangan ke-12 dari Operasi True Promise 3, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim Iran saat ini telah menghancurkan sistem pertahanan Israel di seluruh wilayah Palestina yang diduduki Zionis.

"Dan sekarang, wilayah udara Israel terbuka bagi rudal dan drone Iran," demikian pernyataan IRGC, seperti dikutip Mehr News.

IRGC pada kesempatan itu juga mengimbau warga Israel di wilayah permukiman ilegal untuk segera pergi dari sana. Sebab mereka akan me-

luncurkan serangan rudal bertubi-tubi sesuai janji mantan kepala IRGC Hossein Salami sebelum tewas dibunuh Israel.

"Pastikan suara sirene kalian tidak mati walau sedikit pun," tegas IRGC.

Perang Israel dan Iran semakin panas sejak pecah pada 13 Juni lalu. Kedua negara saling meluncurkan drone, rudal, maupun jet tempur yang telah menewaskan 224 orang di Iran dan 24 orang di Israel, menurut catatan per Senin (16/6).

Iran dan Israel juga terus menyerang fasilitas militer dan energi satu sama lain. Fasilitas nuklir Iran turut dihantam Israel, hingga radiasi terdeteksi dari situs pengayaan uranium Natanz.(cnni/js)

Sumut Peringkat Pertama Korban Perdagangan

Dari Halaman 1

TPPO peringkat 13," sebut Brigjen Nurul di Mapolda Sumut, Kamis (19/6/2025).

Dia menyebut, Bareskrim Polri bersama Polda Sumut ke depan akan meningkatkan pengawasan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri.

"Kita juga meminta kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana pelatihan kerja kepada masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri guna mencegah aksi perdagangan orang," ungkap jenderal bintang satu tersebut.

Sementara, Direktur Reskrim Poldas Sumut, Kombes Pol Ricko Taruna, menjelaskan, pihaknya pada periode Januari-Juni 2025 menangani sebanyak 6 kasus TPPO di wilayah Sumatera Utara.

"Dari enam kasus yang diungkap itu Poldas Sumut menetapkan 10 orang tersangka dan tiga orang berkas perkernya sudah tahap II serta dua tersangka berada di Batubara," terangnya.

Dia menyebut, modus perdagangan orang yang diungkap merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja secara ilegal di Kamboja dan Malaysia sebagai ART, pekerja restoran, perkebunan, dan eksploitasi anak.

"Untuk modus kejahatan yang paling banyak diungkap yakni pekerja migran ilegal. Hasilnya, sebanyak 70 orang dapat diselamatkan terdiri dari 40 orang lelaki, 26 perempuan dewasa dan dua anak perempuan," sebutnya.

Ricko menambahkan, Poldas Sumut nantinya akan membentuk Direktorat PPA dan TPO sebagai bentuk komitmen dalam menyelamatkan masyarakatnya menjadi korban tindak perdagangan orang.

"Dengan dibentuknya direktorat baru ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban perdagangan orang dan menjadi pekerja migran ilegal di luar negeri," pungkasnya. (A-10)

9 Bos Perusahaan Swasta Didakwa.....

Dari Halaman 1

sejak tahun 2012 Indra Suryaningrat; Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama sejak tahun 2015 Eka Sapanca; Presiden Direktur PT Andalan Furmindo sejak tahun 2015 Wisnu Hendraningrat.

Selanjutnya Kuasa Direksi PT Duta Sugar International sejak tahun 2016 Hendrogiarto A. Tiwow; Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur sejak tahun 2012 Hans Falita Utama; dan Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas Ali Sandjaja Boedidarmo.

"Yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan Negara sebesar Rp578.105.411.622,47," ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pen-

gadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (19/6).

Dalam surat dakwaan Tony Wijaya, disebutkan perbuatan diduga korupsi tersebut dilakukan bersama-sama dengan Menteri Perdagangan periode 12 Agustus 2015-27 Juli 2016 Thomas Trikasih Lombong; Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sejak tahun 2015 Charles Sitorus; dan Menteri Perdagangan periode 27 Juli 2016-20 Oktober 2019 Enggartiasto Lukita.

Tom Lombong dan Charles dilakukan penuntutan terpisah, sedangkan Enggar belum diproses hukum hingga saat ini.

Dari kasus dugaan korupsi importasi gula, jaksa menyebut Tony Wijaya NG memperkaya

diri sejumlah Rp150.813.450.163,81; Then Surianto Rp39.249.282.287,52; Hansen Setiawan Rp41.381.685.068,19.

Kemudian Indra Suryaningrat sejumlah Rp77.212.262.010,81; Eka Sapanca Rp32.012.811.588,55; Wisnu Hendraningrat Rp60.991.040.276,14.

Lalu Hendrogiarto A. Tiwow Rp41.226.293.608,16; Hans Falita Utama Rp74.583.958.290,80; dan Ali Sandjaja Boedidar-mo Rp47.868.288.631,28.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(cnni/js)

Integritas Tak Bisa Dibeli: Uang Bukan Obat

Dari Halaman 1

tergiur suap. Namun, sejarah dan pengalaman—baik dari dalam maupun luar negeri—berulang kali menunjukkan: integritas tidak sekadar persoalan isi dompet. Ia adalah soal sistem. Dan sistem peradilan kita masih jauh dari kata sehat.

Mari lihat kenyataan di balik toga. Selama ini, proses rekrutmen hakim masih lebih banyak ditentukan oleh koneksi ketimbang kompetensi. Integritas belum menjadi fondasi, sekadar bonus bila ada. Komisi Yudisial yang seharusnya jadi penjaga etika, terbatasi wewenangnya. Sementara pengawasan di Mahkamah Agung tak cukup independen untuk mencegah pelanggaran dari dalam. Semua ini menciptakan ruang gelap—tempat di mana mafia hukum bisa tumbuh subur, terlindungi oleh sistem yang permisif.

Marak Jual Beli Perkara
Lalu ada budaya "jual-beli" perkara yang sudah lama jadi rahasia umum. Lobi vonis, intervensi kekuasaan, hingga transaksi keputusan menjadi rutinitas yang nyaris normal. Dalam kondisi seperti ini, vonis yang ringan untuk pelaku korupsi besar atau huku-

man berat untuk pelanggaran kecil bisa saja tidak lagi mencerminkan keadilan, tetapi harga.

Selain itu, jangan lupa, beban kerja yang timpang serta fasilitas minim di daerah juga jadi lubang besar dalam integritas. Hakim yang bekerja di bawah tekanan dan serba kekurangan lebih rentan terjebak dalam tawaran "solusi instan".

Apa yang dibutuhkan bukan hanya tambahan rupiah, melainkan reformasi menyeluruh: dari cara hakim dipilih, bagaimana mereka diawasi, hingga bagaimana putusan mereka dipertanggungjawabkan secara publik. Teknologi bisa membantu membuka transparansi proses hukum. Partisipasi masyarakat sipil bisa memperkuat pengawasan. Tapi semua itu hanya mungkin jika ada kemauan politik yang benar-benar serius.

Belajar dari Negara Lain: Gaji Besar Tak Selalu Efektif

Pengalaman Ghana dan Nigeria menjadi cermin. Di sana, aparat hukum digaji tinggi, tapi korupsi tetap hidup karena akuntabilitas lemah dan sistem dibiarkan rusak. Indonesia tentu tak ingin mengulang cerita serupa.

Naikkan gaji hakim? Silakan. Tapi jangan berhenti di sana. Jangan biarkan kebijakan ini menjadi topeng kemewahan yang menutupi wajah peradilan yang sebenarnya masih kusam. Indonesia pun bisa jatuh ke lubang yang sama jika hanya fokus pada nominal tanpa membenahi sistem secara menyeluruh. Gaji besar tanpa reformasi ibarat menuang air ke dalam ember bocor!

Bukan Cuma Soal Gaji, Tapi Soal Keberanian Merombak Sistem

Naikkan gaji hakim bisa jadi langkah awal yang positif. Tapi kalau sistemnya tetap bobrok, hasilnya hanya jadi perbaikan kulit luar. Selama rekrutmen masih longgar, pengawasan setengah hati, dan budaya suap dibiarkan hidup, mafia peradilan akan tetap punya ruang bernapas.

Membersihkan dunia peradilan tak cukup dengan mengisi dompet. Yang dibutuhkan adalah nyali untuk bersih-bersih sistem: menyapu praktik busuk, membuka ruang transparansi, dan membangun budaya hukum yang berintegritas. Sebab pada akhirnya, integritas tak bisa dibeli—ia dibangun, diuji, dan dijaga.(*)



Islam Kebanjiran Mualaf

Dari Halaman 1

dan harapan baru. Namun di tengah sorak-sorai publik Muslim atas "kebanjiran mualaf", kita perlu bertanya: apakah kita hanya pandai menyambut, tapi lajai membimbing?

Bagi sebagian umat, meningkatnya jumlah mualaf dipandang sebagai bukti kebenaran Islam yang semakin diakui dunia. Statistik konversi dijadikan narasi kemenangan, seolah umat Islam sedang unggul dalam "kompetisi agama". Namun apakah kemenangan hanya diukur dari jumlah?

Kita sering terpaku pada angka, tapi melupakan proses. Banyak mualaf mengalami disorientasi setelah konversi. Tak jarang mereka kehilangan dukungan keluarga, terisolasi dari lingkungan, bahkan menghadapi tekanan psikologis. Dalam konteks itu, menjadi Muslim bukan sekadar mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi juga menapaki jalan panjang pemahaman dan penghayatan.

Apakah umat Islam sudah cukup hadir untuk mendampingi proses itu? Ataukah kita hanya ramai saat menyambut, lalu berlalu ketika proses pembinaan mulai?

Al-Qur'an menempatkan mualaf sebagai bagian penting dari masyarakat Muslim. Mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat, bukan semata karena status sosial-ekonominya, tetapi karena kebutuhan mereka terhadap penguatan hati dan dukungan sosial. Namun di lapangan, realitasnya tak selalu sesuai.

Banyak mualaf yang mengeluh kesepian dalam komunitas Muslim. Mereka merasa asing di masjid karena latar belakangnya yang berbeda. Beberapa dari mereka kesulitan mengikuti pengajian karena bahasa atau istilah keislaman yang tak familiar. Ada juga yang menjadi korban eksploitasi, baik oleh kelompok-kelompok ekstrem maupun oleh pelaku bisnis dakwah instan.

Fenomena "Islam kebanjiran mualaf" juga membuka celah eksploitasi. Tak sedikit konten di media sosial yang menjadikan proses konversi mualaf sebagai komoditas. Ada video yang memperlihatkan syahadat mualaf secara dramatis, lengkap dengan tepuk tangan dan tangis haru. Ada pula narasi-narasi konversi yang menyereng agama sebelumnya secara provokatif.

Dakwah yang beretika seharusnya menjaga privasi, memberi ruang tumbuh, dan mendahulukan pembinaan daripada viralitas. Kita tidak kekurangan penceramah, tapi kita sering kekurangan pembimbing ruhani yang sabar dan bijak untuk mendampingi para mualaf.

Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin. Ia melampaui batas etnis, bangsa, dan bahasa. Namun sayangnya, tidak semua komunitas Muslim mencerminkan semangat itu. Masih banyak praktik eksklusivisme: mualaf yang bukan pribumi dipandang "belum Islam sepenuhnya", atau mualaf dari kalangan tertentu diperlakukan dengan curiga.

Untuk menjadikan Islam benar-benar universal, maka komunitas Muslim harus membongkar sekat-sekat sosial yang tidak relevan. Masjid harus menjadi ruang inklusif bagi siapa pun, baik yang baru belajar membaca Al-Qur'an, maupun yang datang dengan pakaian dan logat berbeda. Dakwah tidak boleh hanya menyasar yang "sudah paham", tetapi justru harus lebih hadir bagi mereka yang baru datang mengetuk pintu Islam.

Kebanjiran mualaf adalah anugerah. Tapi seperti semua anugerah, ia datang bersama tanggung jawab. Kita tidak boleh puas hanya dengan statistik. Kita harus menyiapkan infrastruktur keilmuan, sosial, dan psikologis yang mendukung perjalanan spiritual para mualaf.

Lembaga pendidikan Islam harus membuka kelas khusus untuk mualaf dengan pendekatan kontekstual. Masjid dan komunitas harus membentuk unit pembinaan mualaf, bukan hanya program seremonial syahadat. Para da'i harus melatih diri menjadi pendengar dan penuntun, bukan hanya penyampai materi.

Mualaf bukan tamu dalam Islam. Mereka adalah saudara kita. Dan seperti semua saudara, mereka tidak butuh sorotan, tetapi pelukan. Tidak butuh gemuruh tepuk tangan, tapi bimbingan yang istiqamah.